

Shoushika: Pilihan Rasional Perempuan Jepang terhadap Ketimpangan Gender

Shoushika: Japanese Women's Rational Choices towards Gender Inequality

Clarista Dilla Eka Rahmasari¹, Linda Dwi Eriyanti², & Agung Purwanto³

¹Universitas Jember, Jember, Indonesia, Email: clarista.dilla2@gmail.com

²Universitas Jember, Jember, Indonesia, Email: linda.fisip@unej.ac.id

³Universitas Jember, Jember, Indonesia, Email: agung.humas@unej.ac.id

Abstract

By using liberal feminism perspective, this study explains the trend of declining birth rate (*Shoushika*) among Japanese women. Although the government has facilitated women in giving birth through policies, the *Shoushika* phenomenon continues to increase among women. The policy seemed to consider the *Shoushika* issue as a purely technical economic problem, and viewed the female population as a source of labor, which led to a lack of improvement in the situation. This study uses qualitative descriptive methods to explore the reasons behind the increasing trend of *Shoushika* phenomenon from the perspective of Japanese women. The findings highlight that many Japanese women still face various gender-based inequalities that are very burdensome when they marry or have children, thus leading to a tendency to choose *Shoushika* as a form of resistance. This writing contributes to a broader understanding that *Shoushika* is not only an economic problem, but also related to traditional gender cultural inequalities that need to be fixed.

Abstrak

Dengan menggunakan perspektif feminisme liberal, studi ini menjelaskan tren penurunan angka kelahiran (*Shoushika*) di kalangan perempuan Jepang. Meskipun Pemerintah Jepang telah mengeluarkan banyak kebijakan positif yang mendukung kelahiran anak, namun fenomena *Shoushika* masih terus meningkat di kalangan perempuan. Kebijakan pemerintah tersebut tampaknya menganggap isu *Shoushika* sebagai persoalan teknis ekonomi semata, dan memandang perempuan sebagai sumber tenaga kerja, sehingga menyebabkan kurangnya perbaikan dalam situasi tersebut. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi alasan di balik tren peningkatan fenomena *Shoushika* dari perspektif perempuan Jepang. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa banyak perempuan Jepang masih menghadapi berbagai ketimpangan berbasis gender yang sangat memberatkan ketika mereka menikah atau memiliki anak, sehingga menyebabkan kecenderungan untuk memilih *Shoushika*. Tulisan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas bahwa *Shoushika* bukan hanya sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga terkait dengan ketimpangan budaya gender tradisional yang perlu diperbaiki.

Article history

Received 1 November 2025

Accepted 10 December 2025

Published 31 December 2025

Keywords

liberal feminism; *shoushika*; Japan; gender inequality.

Kata kunci

feminisme liberal; *shoushika*; Jepang; ketimpangan gender.

How to cite this article

Rahmasari, C. D. E., Eriyanti, L. D., & Purwanto, A. (2025). *Shoushika: Pilihan rasional perempuan Jepang terhadap ketimpangan gender. Doh Gisin*, 2(2), 41–52. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/4368>

Corresponding author: Clarista Dilla, Email: clarista.dilla2@gmail.com

Pendahuluan

Penurunan angka kelahiran secara terus-menerus di Jepang atau dikenal dengan sebutan *shoushika* telah menjadi perhatian nasional dan internasional selama beberapa tahun terakhir. Kata *shoushika* (少子化) berasal dari huruf kanji (少) = sedikit, (子) = anak, dan (化) = perubahan. *Shoushika* dapat didefinisikan sebagai tren penurunan angka kelahiran di Jepang yang dimulai setelah terjadinya ledakan jumlah kelahiran terakhir pada rentang tahun 1971—1974. Sejak saat itu, angka kelahiran di Jepang tercatat terus mengalami penurunan sedangkan angka kematiannya bertambah dengan tingkat kecepatan pertumbuhan minus hingga menyentuh -0,51% pada tahun 2022 (Theresia, 2024). Berdasarkan data Badan Statistik Jepang, angka kelahiran di Jepang tercatat hanya sekitar 686.000 kelahiran pada tahun 2024, penurunan angka terendah untuk pertama kalinya hingga jatuh ke titik di bawah 700.000 sejak catatan dimulai pada awal abad ke-20 (Japan Statistics Bureau, 2024).

Masalah kependudukan serius yang dialami Jepang ini diakibatkan oleh transisi demografi dengan banyaknya penuaan populasi (*population aging*) tanpa diimbangi peningkatan angka kelahiran. Saat ini, populasi lansia berusia di atas 65 tahun di Jepang melebihi 36 juta atau 29,1% dari total populasi (Japan Statistics Bureau, 2024). Sedikitnya angka kelahiran Jepang dalam jangka panjang mengakibatkan kekurangan tenaga kerja, sehingga tidak akan bisa menopang roda perekonomian Jepang yang sudah sedemikian maju. Menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Jepang dengan persoalan demografis ini, sebuah penelitian yang dikutip oleh Bloomberg menyatakan bahwa Jepang akan kekurangan tenaga kerja sebanyak lebih dari 11 juta pekerja pada tahun 2040 (Furuya, 2023). Dengan potensi kekurangan tenaga kerja, pesatnya proses penuaan populasi disertai drastisnya penurunan angka kelahiran, maka persoalan *shoushika* menjadi ancaman serius bagi negara Jepang.

Penelitian terdahulu umumnya mengidentifikasi penurunan angka kelahiran yang terjadi di Jepang disebabkan oleh faktor ekonomi, termasuk orientasi karier yang kompetitif, atau tingginya biaya hidup. Namun, di saat pemerintah Jepang telah mengambil banyak kebijakan pro-natalis yang secara garis besar berfokus untuk membantu perekonomian generasi muda, persoalan *shoushika* justru terus meningkat. Kebijakan pemerintah tersebut dinilai masih kurang memadai karena tidak sepenuhnya mengatasi akar persoalan, yakni struktur sosial yang masih menghambat kebebasan perempuan. Masyarakat homogen Jepang masih menjunjung tinggi kebudayaan dan norma tradisional yang cenderung membuat mereka bersifat diskriminatif dengan tingkat kesetaraan gender yang masih tergolong rendah. Dalam skala internasional melalui data World Economic Forum (WEF) 2023, Jepang dinyatakan menduduki peringkat ke-125 dari total 146 negara dalam Global Gender Gap Rankings (World Economic Forum, 2023). Kebijakan pemerintah yang afirmatif terhadap perempuan usia kerja yang belum juga berhasil menjadi indikasi bahwa persoalan *shoushika* lebih kompleks dari sekadar persoalan ekonomi (Andika, Murialti, & Widiarsih, 2024).

Kompleksitas tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh alasan lain mengapa para perempuan memilih *shoushika*. Untuk itu, peneliti mencoba menganalisis persoalan *shoushika* melalui perspektif feminisme liberal. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan mengapa tren fenomena *shoushika* masih terus meningkat di kalangan masyarakat Jepang, khususnya perempuan, jika dilihat dari perspektif feminisme liberal dengan berkaca pada mengakarnya struktur budaya ketimpangan gender yang dialami.

Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal dengan poin penting kesetaraan gender (*gender equality*) untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tren persoalan *shoushika* masih terus meningkat di kalangan masyarakat, khususnya perempuan Jepang. Gelombang kedua feminisme tahun 1969-1970 memunculkan istilah “My Body, My Choice” yang diadopsi oleh berbagai gerakan feminis, termasuk feminis liberal untuk menegaskan otonomi individu sebagai hak sipil yang sah (Blom T., 2024). Untuk itu, penelitian ini akan mengidentifikasi adanya pilihan rasional perempuan terhadap ketimpangan bias gender tradisional dibalik berkembangnya fenomena *shoushika* di Jepang melalui perspektif feminisme liberal. Konsep kesetaraan gender dalam feminisme liberal juga diperlukan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan yang masih diterima oleh perempuan Jepang yang berimbas pada keputusan reproduksinya. Penelitian ini berargumen bahwa meningkatnya tren fenomena *shoushika* di Jepang disebabkan karena para perempuan masih mengalami adanya ketimpangan yang menyebabkan mereka ada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika menikah atau memiliki anak. Sedangkan di sisi lain, kebijakan pemerintah cenderung bersifat mekanistik, tanpa menyelesaikan persoalan ketimpangan gender yang menjadi tuntutan *shoushika* dari para perempuan.

Metode

Penyelesaian penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam dalam konteks alamiah dari sebuah fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif (Sugiyono, 2018). Peneliti memilih pendekatan ini untuk mencapai tujuan penelitian, yakni analisis dan interpretasi mendalam terkait alasan dan konteks sosial-budaya dibalik meningkatnya tren *Shoushika* khususnya di kalangan perempuan Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi awal terkait adanya ungkapan pilihan perempuan Jepang untuk tidak memiliki anak dan protes terhadap ketimpangan gender yang ada. Pilihan tersebut tercermin dalam kemampuan perempuan untuk mengatakannya melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Berangkat dari temuan tersebut, nantinya dicari data valid yang selaras dan dapat membuktikan realita sosial yang ditemukan.

Penelitian ini menjadikan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam menjalankan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur (kepuustakaan). Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur tertulis, misalnya buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, media sosial, dan dokumen-dokumen relevan lainnya (Sugiyono, 2018). Dokumen tersebut dapat berupa data statistik, siaran pers, atau laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dewan-dewan di bawahnya, lembaga-lembaga, serta pihak kementerian dan badan Pemerintah Jepang yang turut berperan langsung dalam pengupayaan kesetaraan gender dan penanganan persoalan *Shoushika* di Jepang. Dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi data penguat dalam berlangsungnya penelitian. Keabsahan data penelitian ini dipastikan dengan metode triangulasi sumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Proses pengolahan data di sini dapat berupa analisis data, penggambaran data, dan perangkuman peristiwa yang terjadi. Analisis data ini ditampilkan peneliti dalam bentuk diagram atau grafik sehingga dari data tersebut peneliti dapat menganalisis dan menemukan pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa harus memahami konstanta atau nilai-nilai yang terlalu spesifik. Peneliti menilai bahwa teknik analisis deskriptif sangat cocok dan layak untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini.

Pembahasan

1. Konteks dan Pilihan Rasional Perempuan Jepang dibalik *Shoushika*

Fenomena *shoushika* atau penurunan angka kelahiran di Jepang muncul sejak 1970-an dan menjadi isu besar pada 1990 dengan *highlight* “1.57 Shock” (Widiandari, 2016). Penurunan ini mencerminkan perubahan pola pikir generasi muda, terutama perempuan, yang memilih untuk menolak ekspektasi tradisional tentang pernikahan dan peran keibuan. Kesadaran akan hak reproduksi perempuan, yang diperkuat oleh Konferensi Kairo (1994) dan Beijing (1995), mendorong perempuan Jepang untuk memandang keputusan menikah dan memiliki anak sebagai pilihan pribadi, bukan kewajiban sosial (Widhiutami & Santoso, 2025). Seiring waktu, tren ini semakin kuat. Data tahun 2024 menunjukkan angka kelahiran Jepang turun di bawah 700.000, menjadikannya rekor terendah dalam sepanjang sejarah Jepang (Japan Statistics Bureau, 2024). Banyak perempuan Jepang kini lebih memprioritaskan karier dibanding pernikahan, karena melihat pernikahan sebagai beban yang merampas otonomi tubuh dan menimbulkan ketimpangan kerja domestik bagi mereka (Widiandari, 2016).

Pilihan perempuan ini juga tampak di media sosial, seperti di platform X (Twitter), di mana banyak perempuan Jepang mengekspresikan kritik terhadap pernikahan dan ketergantungan pada laki-laki, serta mendukung ide-ide feminis dan pemberdayaan diri. Sebuah riset wawancara yang digelar oleh The Japan Reporter pada tahun 2023 juga menunjukkan hal yang sama, yakni banyak perempuan Jepang saat ini lebih ingin memprioritaskan karier daripada ekspektasi tradisional tentang pernikahan dan peran keibuan yang memberatkan (Women, 2023). Adanya *mindset* pilihan rasional yang sama dari perempuan Jepang juga banyak ditemukan dalam postingan dan komentar di berbagai platform media sosial lainnya. Dengan realita-realita sosial tersebut, *shoushika* menjadi lebih dari sekadar persoalan demografi, tetapi juga bentuk pilihan paling rasional dari perempuan Jepang terhadap struktur gender tradisional yang dianggap tidak adil dan mengekang kebebasan mereka.

2. Ketimpangan Gender yang Dialami Perempuan Jepang

a. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan sebagai hasil dari struktur hukum dan sosial yang memberikan batasan pada partisipasi perempuan dalam berbagai bidang masih cukup umum ditemukan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, atau kebijakan. Sebagai contoh, representasi perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) sangat rendah, dengan hanya sekitar 17,6% mahasiswa teknik adalah perempuan pada tahun 2024 (University World News, 2024). Hal ini mengindikasikan masih kuatnya *stereotype* bahwa bidang eksakta diperuntukkan bagi laki-laki.

Diskriminasi juga terjadi dalam penerimaan mahasiswa baru, seperti kasus Universitas Kedokteran Tokyo (2018) yang terbukti menurunkan nilai ujian masuk calon mahasiswa perempuan karena dianggap tidak mampu bekerja lama setelah menikah atau memiliki anak (The Jakarta Post, 2024). Investigasi menemukan beberapa universitas lain melakukan praktik serupa (Human Rights Now, 2024). Selain itu, hingga akhir 2023, beberapa High School di Tokyo masih menerapkan kuota penerimaan berdasarkan gender, yang membatasi kesempatan perempuan meskipun memiliki nilai akademik tinggi (Kyodo News, 2023). Kebijakan ini baru dihapus setelah lama dinilai merugikan perempuan. Secara keseluruhan, berbagai kasus ini mencerminkan masih kuatnya diskriminasi terselubung terhadap perempuan Jepang dalam sistem pendidikan, terutama melalui *stereotype* gender dan ketentuan yang membatasi akses serta peluang mereka.

Teori feminisme liberal menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dapat mencapai otonomi diri melalui jalur hukum ataupun pendidikan. Namun, ketika sistem pendidikan menghambat hal-hal ini, maka muncul konsekuensi logis terhadap pilihan hidup perempuan, termasuk keputusan untuk berkeluarga. Adanya ketimpangan gender dalam pendidikan ini menciptakan rantai ketidakadilan yang berujung pada keputusan perempuan Jepang untuk memilih *Shoushika*.

Di bidang pekerjaan, Jepang telah memiliki Equal Employment Opportunity Law (EEOL) sejak 1997 untuk melarang diskriminasi gender di tempat kerja, namun praktik ketimpangan masih tetap terjadi (European Association for International Education, 2020). Banyak perusahaan masih menerapkan sistem Dual Career Tracks, yakni *sogo-shoku* (karier) dan *ippan-shoku* (administrasi) (Hata, 2021). Jalur *sogo-shoku*, yang didominasi laki-laki, menawarkan peluang promosi dan posisi manajerial, sedangkan *ippan-shoku*, yang mayoritas diisi perempuan, bersifat administratif dengan jenjang karier terbatas. Di sisi lain, banyak perempuan Jepang memilih pekerjaan non-reguler (paruh waktu atau kontrak sementara) karena tuntutan tanggung jawab rumah tangga (Afiati, 2021). Akibatnya, mereka menerima gaji lebih rendah dan memiliki peluang kemajuan karier yang minim dibanding laki-laki. Dalam bingkai feminisme liberal, fenomena *Shoushika* di Jepang juga menjadi dampak dari sistem ketenagakerjaan yang belum memberikan kebebasan dan kesempatan yang benar-benar setara bagi perempuan. Selama struktur kerja masih memaksa perempuan memilih antara karier atau keluarga, mereka cenderung memilih otonomi diri, yang memperburuk penurunan angka kelahiran di Jepang. *Shoushika* masih menjadi pilihan paling rasional sebagai strategi untuk mempertahankan posisi perempuan di dunia kerja dan menghindari eksklusi dari jenjang karier yang strategis.

Kebijakan Womenomics yang menargetkan 30% posisi kepemimpinan diisi perempuan pada 2020 gagal tercapai, hanya 11,8% yang berhasil, sehingga target tersebut kini diperpanjang hingga 2030 (Konrad Adenauer Stiftung, 2022). Rendahnya keterlibatan perempuan dalam posisi tinggi disebabkan oleh ekspektasi sosial yang menuntut perempuan untuk berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak, yang kemudian membentuk fenomena “kurva M” dalam partisipasi kerja perempuan Jepang (The Statistics Bureau of Japan, 2023). Secara keseluruhan, diskriminasi terselubung, struktur kerja patriarkal, dan tekanan sosial masih menjadi hambatan utama bagi perempuan Jepang untuk mencapai kesetaraan dalam dunia kerja.

Meskipun Jepang berupaya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, berbagai kebijakan pemerintah masih mempertahankan struktur patriarkal yang lebih menguntungkan laki-laki. Sistem pajak, asuransi, dan pensiun dirancang untuk mendukung model keluarga tradisional dengan laki-laki bekerja dan perempuan menjadi ibu rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Regulasi seperti Equal Employment Opportunity Act (EEOA) 2006 implementasinya masih lemah (Hiroya, 2022). Dampaknya, kesenjangan upah gender tetap besar. Pada 2023 perempuan menerima upah 24% lebih rendah dibanding laki-laki (IMF, 2024). Kebijakan lain seperti Children's Future Strategy (2023) belum berdaya guna karena tidak mewajibkan ayah mengambil cuti pengasuhan, sehingga sangat minim dimanfaatkan oleh para ayah (WEF, 2023).

Sistem kesejahteraan Jepang secara historis menempatkan kesejahteraan perempuan melalui pernikahan, bukan melalui karier mandiri. Sebagai contoh, sistem pengurangan pajak pasangan memberikan insentif bagi keluarga dengan istri tidak bekerja atau berpenghasilan rendah, namun membebaskan pajak

lebih tinggi pada rumah tangga dengan istri yang aktif bekerja (IMF, 2024). Hal ini menciptakan disinsentif ekonomi bagi perempuan pekerja, sekaligus memperkuat peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Secara keseluruhan, kebijakan Jepang yang tampak netral gender justru menyokong dominasi laki-laki dan menghambat kemajuan perempuan, baik dalam karier maupun kesejahteraan sosial.

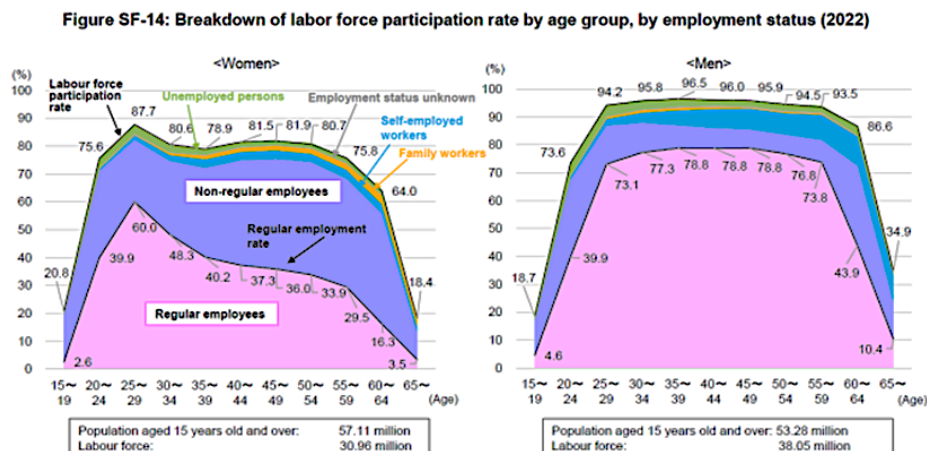
Feminisme liberal menekankan bahwa kebebasan individu dan kesetaraan bagi perempuan dapat dicapai melalui reformasi hukum dan kebijakan. Namun, ketika negara justru memelihara kebijakan yang diskriminatif, hak perempuan untuk memilih jalur hidupnya secara mandiri juga menjadi terhambat. Selama kebijakan negara masih memberikan insentif pada model ibu rumah tangga dan menghukum kemandirian ekonomi perempuan, maka perempuan Jepang dapat terus memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan otonomi individu dan kesetaraan yang tidak diberikan oleh struktur sosial mereka.

b. Subordinasi Perempuan

Subordinasi dihasilkan dari adanya hierarki sosial yang membuat posisi perempuan lebih rendah sehingga memunculkan dominasi laki-laki, seperti halnya dalam partisipasi politik atau partisipasi peran publik. Jepang memiliki tingkat partisipasi politik perempuan paling rendah di antara negara maju lainnya, menempati peringkat 165 dari 193 negara dalam keterwakilan parlemen (Nippon.com, 2019). Pada 2023, perempuan hanya mengisi 10% kursi di House of Representatives, 25% di House of Councillors, dan 15,6% di parlemen lokal, dengan banyak daerah yang bahkan tidak memiliki anggota perempuan sama sekali (McKee, 2023). Rendahnya representasi ini disebabkan oleh budaya patriarki dan struktur politik yang mengakar, yang menciptakan siklus tertutup: lemahnya gerakan politik perempuan membuat mereka sulit menuntut representasi lebih besar, sehingga partisipasi tetap rendah. Partai dominan Liberal Democratic Party (LDP) menetapkan target 30% keterwakilan perempuan, tetapi implementasinya sering hanya simbolis (McKee, 2023). Sistem pemilihan di Jepang juga cenderung menguntungkan kandidat laki-laki petahana daripada kandidat perempuan baru (McKee, 2023).

Meskipun perempuan Jepang aktif di media sosial, mereka jarang terlibat dalam diskusi politik yang masih didominasi laki-laki (Tonami & Yamamoto, 2024). Minimnya partisipasi perempuan di politik berdampak langsung pada kurangnya perhatian terhadap isu kesetaraan gender, pengasuhan anak, dan *work-life balance*. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak pada kebutuhan perempuan dan justru memperkuat struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi subordinat. Kondisi ini berkontribusi terhadap berlanjutnya fenomena *shoushika* karena perempuan enggan menikah atau memiliki anak di tengah sistem yang tidak mendukung kesetaraan peran gender.

Di sisi lain, perempuan Jepang masih menghadapi subordinasi ekonomi yang terlihat dari posisi mereka dalam kelas pekerjaan yang umumnya lebih rendah dengan upah yang lebih kecil dibanding laki-laki. Ketimpangan ini menempatkan perempuan pada status sosial dan ekonomi yang inferior serta memperkuat struktur ketimpangan gender. Akibatnya, kondisi tersebut turut berkontribusi pada memburuknya fenomena *shoushika*, karena perempuan semakin enggan menikah atau memiliki anak di tengah ketimpangan ekonomi yang mereka alami.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan Status Pekerjaan
(Sumber: Gender Equality Bureau Government of Japan, 2023)

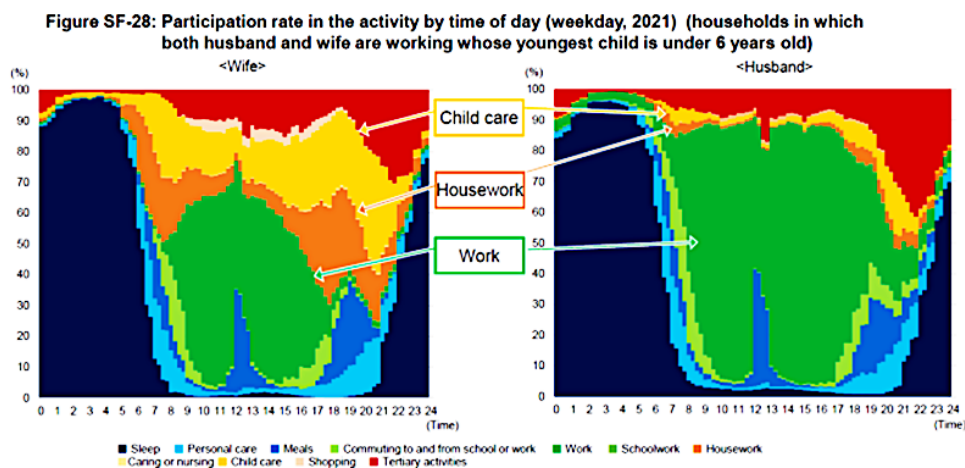
Data Gender Equality Bureau tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan Jepang mencapai puncak 87,7% pada usia 25–29 tahun, namun menurun tajam setelah usia 45 tahun. Pada awal karier, banyak perempuan bekerja sebagai pegawai tetap, tetapi setelah usia 30 tahun, proporsi pekerja tidak tetap (*non-regular*) meningkat. Penurunan ini berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dan pengasuhan anak, yang mendorong banyak perempuan beralih ke pekerjaan lebih fleksibel atau menjadi penyedia perawatan keluarga.

Kesenjangan karier di Jepang berlanjut menjadi kesenjangan upah yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Pada 2021, perempuan hanya menerima 78% dari upah laki-laki, dan pada 2023–2024 kesenjangan ini meningkat menjadi 24%, jauh di atas rata-rata negara OECD (Everett, 2024). Perempuan juga memiliki peluang promosi lebih kecil, sementara laki-laki dengan kualifikasi lebih rendah pun bisa naik jabatan (Sato et al., 2019). Kondisi ini menciptakan ketidakamanan ekonomi bagi perempuan, yang membuat mereka lebih memilih fokus pada karier daripada menikah atau memiliki anak. Akibatnya, kesenjangan upah dan subordinasi ekonomi perempuan turut memperparah rendahnya angka kelahiran (*shoushika*) dan memperdalam tantangan sosial-ekonomi Jepang.

Meskipun Jepang telah maju secara ekonomi dan memiliki berbagai kebijakan yang meliberalkan perempuan, budaya patriarki dan ekspektasi peran gender tradisional masih sangat kuat. Perempuan tetap diharapkan menjadi penanggung jawab utama rumah tangga dan pengasuhan anak, bahkan jika mereka bekerja. Akibatnya, banyak perempuan mengalami tekanan dan dilema antara karier dan keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya angka kelahiran (*shoushika*).

Pemerintah Jepang juga sering dianggap kontradiktif: di satu sisi seakan berpihak pada perempuan melalui kebijakan seperti *Womenomics*, namun di sisi lain tetap menuntut peran perempuan sebagai istri dan ibu. Sebagai contoh, usulan Marriage Relocation Scheme dan kebijakan tunjangan anak yang lebih besar bagi keluarga dengan tiga anak atau lebih cukup menunjukkan cara pandang pemerintah yang masih menilai perempuan terutama dari perannya dalam reproduksi, bukan sebagai agen ekonomi (CBS News, 2024). Pendekatan pemerintah terhadap isu *shoushika* sering kali tidak menyentuh akar masalah ketimpangan struktural dan tekanan sosial terhadap perempuan ini (Kyodo News, 2024). Akibatnya, perempuan Jepang tetap sulit menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga di tengah budaya yang masih patriarki.

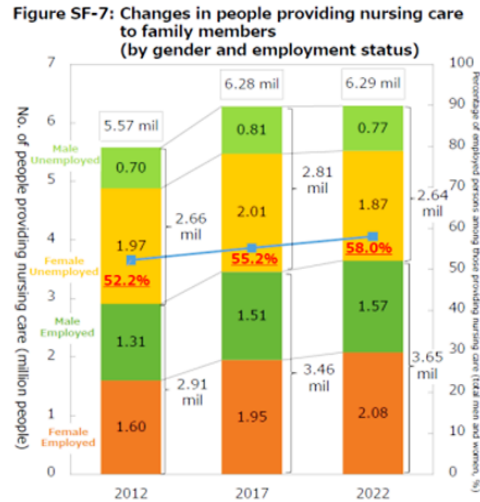
c. Beban Ganda



Gambar 2. Grafik Perbandingan Pembagian Peran Gender
(Sumber: *Gender Equality Bureau Government of Japan, 2023*)

Data dari Japan Statistics Bureau (2024) menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam pembagian tanggung jawab domestik antara suami dan istri di Jepang. Perempuan menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki lebih banyak waktu untuk bekerja di luar rumah. Akibatnya, perempuan yang bekerja menghadapi beban ganda, dengan tantangan harus menyeimbangkan pekerjaan profesional dan tanggung jawab rumah tangga sekaligus, yang membuat mereka menunda atau membatasi jumlah anak karena tekanan waktu dan energi. Meskipun kedua pasangan bekerja, pola kehidupan sehari-hari tetap menunjukkan peran gender tradisional: suami sebagai pencari nafkah utama, dan istri sebagai pengurus rumah tangga.

Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, perempuan selalu menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki, baik dalam keluarga dengan dua pencari nafkah maupun hanya suami yang bekerja (Japan Statistics Bureau, 2024). Pola ini tidak mengalami perubahan yang berarti, menandakan minimnya peran domestik laki-laki dan tidak adanya perubahan signifikan dalam pembagian peran gender tradisional yang terus membebani perempuan.



Gambar 3. Perubahan Penyedia Perawatan Keluarga Berdasarkan Gender dan Status Pekerjaan
(Sumber: Gender Equality Bureau Government of Japan, 2024)

Data Japan Statistics Bureau (2024) menunjukkan peningkatan jumlah penyedia perawatan keluarga di Jepang dari 5,57 juta (2012) menjadi 6,29 juta (2022), naik sekitar 12,9% dalam satu dekade. Peningkatan ini berkaitan dengan meningkatnya populasi lansia, yang menyebabkan semakin banyak orang, terutama perempuan, menjadi penyedia perawatan keluarga. Fenomena ini menjadi dampak lanjutan dari *shoushika*, yakni menurunnya angka kelahiran menyebabkan populasi menua dan beban perawatan meningkat. Kondisi ini mendorong perempuan menunda atau menghindari memiliki anak karena tekanan waktu dan tanggung jawab yang berat, sementara partisipasi laki-laki dalam pengasuhan tetap rendah. Dari sudut pandang feminisme liberal, *Shoushika* di Jepang merupakan reaksi atas struktur sosial yang belum menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk berhasil tanpa keuntungan atau kerugian yang tidak adil. Selama perempuan terus dibebani oleh tanggung jawab domestik, pengasuhan, dan perawatan lansia secara tunggal di samping pekerjaan formalnya, mereka bisa terus memilih untuk membatasi kelahiran sebagai cara untuk menjaga kedaulatan atas waktu dan hidup mereka.

Kurangnya dukungan perusahaan di Jepang memperburuk beban ganda dan menyulitkan perempuan mencapai *work-life balance*. Banyak perusahaan masih memiliki sedikit eksekutif perempuan, memberikan gaji lebih rendah, serta minim program pengembangan karier bagi perempuan (Kyodo News, 2024). Sistem kerja Jepang masih berasumsi bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sementara perempuan bertugas di ranah domestik. Jam kerja yang panjang dan tekanan tinggi membuat perempuan sulit berkarier, terutama selama masa pengasuhan anak, di mana sekitar 62% perempuan mengalami gangguan karier pada fase ini (Zhou, 2015). Pada tahun 2022, cuti pengasuhan anak hanya diambil oleh 17% pekerja laki-laki dan 80% perempuan. Ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya dorongan bagi laki-laki untuk ikut serta (World Economic Forum, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja di Jepang masih sulit diadaptasi oleh perempuan, dan justru memperkuat subordinasi serta memperburuk dampak sosial seperti rendahnya angka kelahiran (*shoushika*).

d. Stereotype Negatif

Stereotype terhadap perempuan yang muncul dan disebarkan ke masyarakat melalui media sering kali hanya didasarkan pada pemikiran laki-laki sehingga membuatnya tidak seimbang. Konsumsi media ini turut berpengaruh pada penurunan angka kelahiran. Di wilayah dengan paparan media tinggi seperti Tokyo, angka kelahiran mencapai titik terendah 0,96, sedangkan di wilayah tradisional seperti Okinawa masih 1,95 (Amril, 2015). Hal ini menunjukkan hubungan antara paparan media modern dengan perubahan pandangan terhadap

pernikahan dan peran gender. Meskipun pemerintah dan perusahaan Jepang telah berupaya mendorong kesetaraan gender, media massa justru memperkuat *stereotype* tradisional yang membatasi peran perempuan. Berdasarkan riset Cambridge University, media Jepang menggambarkan sosok perempuan ideal adalah “ibu pekerja” yang bahagia menjalani peran ganda antara pekerjaan profesional dan pengasuhan anak (Kyodo News, 2020). Namun, citra ini bersifat paradoks: perempuan dianggap tidak berdaya jika hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga dikritik jika terlalu fokus pada karier dan gagal mengurus keluarga. Tekanan peran ganda ini menyebabkan banyak perempuan menunda pernikahan dan kelahiran anak.

Media juga mempertegas bias gender dengan pandangan bahwa perempuan karier sejatinya adalah “laki-laki di dalam,” seperti pada iklan majalah Domani (J-Cast News, 2019). Bias ini muncul karena dominasi laki-laki di dunia media, dengan hanya sekitar 21,5% jurnalis di Jepang adalah perempuan, dan tidak ada perempuan di posisi pengawasan media cetak (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2020). Akibatnya, representasi dan *stereotype* perempuan dalam media lebih banyak ditulis dari sudut pandang laki-laki. Dalam perspektif feminisme liberal, *Shoushika* merupakan respons dari kegagalan media dan masyarakat dalam mengakui kebebasan individu perempuan secara utuh. Dapat digarisbawahi bahwa representasi perempuan yang negatif dan banyaknya *stereotype* terhadap mereka dapat menjadi penghambat tersendiri bagi para perempuan yang berujung pada penundaan pernikahan ataupun kelahiran anak, yang artinya berimbas langsung pada meluasnya fenomena *Shoushika*. Oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan yang tegas untuk mereformasi media dan perombakan struktural dalam beberapa aspek lainnya, termasuk budaya tempat kerja dan pola dukungan sosial menjadi sangat krusial untuk membalikkan tren *Shoushika*, sekaligus juga membangun lingkungan masyarakat yang terasa lebih adil bagi para perempuan.

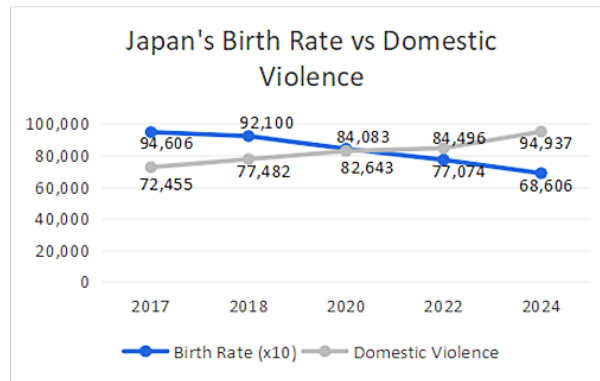
e. Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak seharusnya terjadi, namun kasus pelecehan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di negara maju seperti Jepang. Sekitar 30% perempuan mengalami pelecehan di tempat kerja (The Guardian, 2016) dan 30,1% perempuan pencari kerja mengalaminya saat magang (Nikkei Asia, 2024). Bahkan 52,4% pengusaha perempuan mengaku dilecehkan oleh pejabat laki-laki (Kashino, 2025), menunjukkan pelecehan terjadi lintas sektor dan menjadi faktor negatif yang menghambat karier perempuan.

Kasus besar seperti pemerkosaan terhadap jurnalis Shiori Ito pada 2015 (BBC, 2019) memicu gerakan #MeToo di Jepang (Deutsche Welle, 2019). Kasus lainnya melibatkan pejabat pemerintah seperti Junichi Fukuda, Wakil Menteri Keuangan (Reuters, 2018), serta pelecehan terhadap jurnalis di Kota Nagasaki (Women Press Freedom, 2022). Di sektor hiburan, skandal Johnny Kitagawa (Nagashima, 2024) mengungkap budaya eksploitasi seksual dan budaya diam yang membuat korban enggan melapor. Survei menunjukkan 51,4% pekerja di industri media dan hiburan mengalami pelecehan seksual (Human Rights Now, 2024). Selain pelecehan fisik, kasus pelecehan verbal juga banyak terjadi, seperti di Akuarium Osaka (Squire, 2015). Lebih dari 20% aktor dan 53,8% anggota dewan lokal perempuan juga melaporkan pengalaman serupa (Jiji, 2025).

Dampak dari fenomena ini sangat signifikan; tercatat sebanyak 15% pekerja perempuan terpaksa berganti pekerjaan demi menghindari tindakan pelecehan (Zenbird Media, 2020). Selain itu, 60% perempuan memilih untuk mengundurkan diri setelah kelahiran anak pertama akibat tekanan *matahara* atau pelecehan terkait kehamilan (Diplomatic Courier, 2015).. Penegakan hukum yang lemah dan budaya bungkam memperparah situasi, menciptakan siklus pelecehan dan penurunan partisipasi perempuan secara penuh di dunia kerja. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap krisis demografi (*shoushika*). *Shoushika* menjadi bentuk pilihan individu untuk menghindari sistem yang gagal memberikan perlindungan dasar dan rasa aman. Selama pelecehan seksual tetap terjadi secara sistemik dan penegakan hukumnya lemah, maka perempuan akan terus memilih untuk tidak bereproduksi sebagai cara melindungi kemandirian dan integritas diri mereka.

Di sisi lain, Jepang menghadapi penurunan angka kelahiran bersamaan dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan. Data National Police Agency (NPA) mencatat sebanyak 94.937 kasus KDRT pada 2024, tertinggi sepanjang sejarah dan naik 14,6% sejak 2011 (The Japan Times, 2025). Dari jumlah tersebut, 73,1% korban adalah perempuan (Morishita, Yasuda, & Suda, 2024), dengan 1 dari 4 perempuan menikah pernah mengalami kasus KDRT (ISSH International, 2024). Namun, hanya 2,2% korban yang melapor ke polisi karena budaya *self-blame* dan tekanan sosial (Nippon Communications Foundation, 2018). Meningkatnya KDRT di Jepang tidak hanya memperburuk kesejahteraan perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap krisis demografi (*shoushika*), karena rasa tidak aman dan trauma membuat banyak perempuan enggan menikah atau memiliki anak.



Gambar 4. Perbandingan Kasus Kekerasan Domestik Dengan Tingkat Kelahiran
(Sumber: *Japan Statistics Bureau & National Police Agency, 2024*)

Analisis statistik menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara peningkatan kasus KDRT dan penurunan angka kelahiran di Jepang, mengindikasikan adanya hubungan kausal antara keduanya. Perempuan yang menyaksikan kekerasan rumah tangga sejak kecil cenderung menunda atau menghindari pernikahan dan kehamilan karena trauma (JSS Newsletter, 2015). Selain itu, faktor ekonomi turut memperparah situasi: perempuan dengan pendapatan di bawah 3 juta yen per tahun memiliki risiko 2,6 kali lebih tinggi mengalami kekerasan (Maruyama et al., 2023), yang menyebabkan mereka ragu memiliki anak karena beban finansial. Korban KDRT juga berpeluang 4,8 kali lebih tinggi menjadi ibu tunggal setelah bercerai, dengan tingkat kemiskinan mencapai 50% (Maruyama et al., 2023). Stigma sosial terhadap ibu tunggal di Jepang juga memperburuk tekanan ekonomi dan psikologis.

Meski Jepang memiliki Undang-Undang Pencegahan KDRT (2001), penerapannya masih lemah. Hingga 2023, kekerasan psikologis bahkan belum diakui secara hukum (Morishita et al., 2024). Selain itu, UU hak asuh bersama memaksa korban tetap berhubungan dengan pelaku (Unseen Japan, 2024), dan pengadilan sering tidak konsisten dalam menangani kasus kekerasan (Unseen Japan, 2024). Secara keseluruhan, meningkatnya KDRT tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada krisis demografi Jepang (*shoushika*). Hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan persoalan *Shoushika* sangat kompleks, namun saling mempengaruhi. Pencatatan data menunjukkan pola statistik yang jelas, bahwa seiring meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, angka kelahiran terus-menerus menurun hingga ke titik terendah sepanjang sejarah, menciptakan sebuah keniscayaan siklus yang mengancam demografi Jepang di masa depan. Kekerasan domestik menghambat partisipasi perempuan dalam keluarga dan reproduksi, sehingga penanganannya membutuhkan reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk memutus siklus kekerasan dan memperbaiki kondisi demografi Jepang di masa depan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab tren fenomena *shoushika* masih terus meningkat di kalangan perempuan Jepang adalah karena adanya hambatan struktural dan kultural yang memberikan batasan dan membebani perempuan secara tidak adil, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Akar permasalahan *shoushika* tidak hanya terletak pada persoalan ekonomi, tetapi juga pada paham bias gender yang mengakar kuat di masyarakat Jepang. Ketimpangan gender tersebut termasuk marginalisasi, subordinasi, beban ganda, *stereotype* negatif, dan kekerasan masih menyelubungi berbagai tahap kehidupan perempuan Jepang melalui berbagai lingkup.

Analisis pendekatan *shoushika* melalui perspektif feminisme liberal menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan pilihan rasional dari para perempuan Jepang terhadap ketimpangan gender yang terjadi. Adanya peningkatan angka *shoushika* menjadi suatu indikasi bahwa problematika ini belum bisa ditangani secara tepat oleh Pemerintah Jepang. Kebijakan penanganan *shoushika* dari pemerintah saat ini masih kurang memadai karena masih berfokus pada solusi mekanistik ekonomi dan subsidi, tanpa menyentuh akar permasalahan budaya ketimpangan gender yang menjadi salah satu pusat persoalan dari sisi perempuan. Solusi untuk mengatasi *shoushika* memerlukan penetapan kebijakan dari pemerintah yang tidak hanya bersifat mekanistik dan berorientasi ekonomi, tetapi juga harus responsif terhadap isu gender dengan mengatasi akar permasalahan ketimpangan gender dalam struktur sosial masyarakat Jepang.

Daftar Pustaka

- Afiati, K. N. (2021). *Penerapan stage of norms dalam implementasi norma*. Universitas Islam Indonesia.
- Amril, O. (2015). *Fenomena shoushika di antara sistem pendidikan Jepang dan persamaan gender*. Ejurnal Bung Hatta.
- Andika, J., Murialti, N., & Widiarsih, D. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi timbulnya fenomena shoushika di negara Jepang. *Journal of Sustainable Economic Studies*, 1(1), 1–7.
- BBC. (2019, Desember 18). *Shiori Ito: Japanese journalist awarded \$30,000 in damages in rape case*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-50832524>
- CBS News. (2024, Agustus 30). *Japan tosses plan to woo Tokyo women into rural marriages for cash*. <https://www.cbsnews.com/news/japan-woo-women-into-marriage-for-cash-plan-abandoned/>
- Deutsche Welle. (2019, Desember 18). *Japan: Journalist wins high-profile #MeToo case*. <https://www.dw.com/en/japan-journalist-wins-high-profile-metoo-case/a-51715924>
- Diplomatic Courier. (2015, Agustus 20). *Matahara: An issue with a larger context*. <https://www.diplomaticcourier.com/posts/matahara-an-issue-with-a-larger-context>
- EAIE. (2020, Juni 23). *Tackling gender inequality in the Japanese job market*. European Association for International Education. <https://www.eaie.org/resource/gender-inequality-japan-job-market.html>
- Everett, L. (2024). *Japan's gender wage gap: A call for parental leave and household equity*. The University of Melbourne.
- Furuya, S. (2023). *Future predictions 2040 in Japan: The dawn of the limited-labor supply society*. Recruit Works Institute.
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2020). *Seisaku hōshin kettei katei e no josei no sankaku jōkyō [A report on women's participation in policies and decision-making processes]*. Government of Japan.
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2023). *The white paper on gender equality 2023*. Government of Japan.
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2024). *The white paper on gender equality 2024*. Government of Japan.
- Hata, M. (2021). *Gender inequality in the Japanese workplace: Issues related to the promotion of childcare leave taken by men*. Charles University.
- Hiroya, N. (2022). Gender equality in the workplace from a legal perspective: Current situation and issues of Japan's Equal Employment Opportunity Act. *Japan Labor Issues*, 6(36), 16–24.
- HRN. (2024). *HRN submits report on women's rights issues in Japan*. Human Rights Now.
- International Monetary Fund. (2024). Japan's fertility: More children please. *Japan: Selected Issues*, 2024(119), 20–31.
- ISSH International. (2024, Oktober 15). *Addressing domestic violence in Japan: Breaking the silence*. <https://issinternational.org/10364/features/breaking-the-silence/>
- Japan Statistics Bureau. (2024). *Statistical handbook of Japan 2024*. Ministry of Internal Affairs and Communications.
- J-Cast News. (2019, Maret 2). *'Working women is male after all' criticized by Shogakukan's women's magazine advertisement, expert 'outdated'*. <https://www.j-cast.com/2019/03/02351698.html>
- Jiji. (2025, Juni 8). Over half of local assemblywomen suffer harassment, survey shows. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/06/08/japan/japan-assemblywomen-harassment-survey/>
- JSS Newsletter. (2015, Februari 1). *Counsellor's corner: Domestic violence*. <https://bit.ly/JSSNewsletter-counsellorscorner>

- Kashino, T. (2025). Sexual harassment by multiple stakeholders in entrepreneurship: The case of Japan. *Journal of Business Venturing Insights*, 23, Article e00450.
- Konrad-Adenauer-Stiftung Japan. (2022). *The impact of Japanese style employment systems on women*. <https://kas-japan.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/The-Impacts-of-Japanese-Style-Employment-Systems-on-Women.pdf>
- Kyodo News. (2020, Juli 1). *Japanese women feeling pressured by rise of perfect "mama": Study*. <https://english.kyodonews.net/articles/-/18313>
- Kyodo News. (2023, September 12). *Tokyo scraps gender quota for public high school admissions from 2024*. <https://english.kyodonews.net/articles/-/43325>
- Kyodo News. (2024, Agustus 31). *Japan drops subsidy plan to draw women to rural areas upon marriage*. <https://english.kyodonews.net/articles/-/49625>
- Kyodo News. (2024, Oktober 16). *Women make up 16% of executives in Japan's top-listed firms: Study*. <https://english.kyodonews.net/articles/-/50555>
- Maruyama, N., Horiuchi, S., & Kataoka, Y. (2023). Prevalence and associated factors of intimate partner violence against pregnant women in urban areas of Japan: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15104-w>
- McKee, L. (2023). Balancing the ballot: Going beyond the 2018 Gender Parity Law to encourage women's political participation in Japan. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 21(12).
- Morishita, J., Yasuda, M., & Suda, S. (2024). *Help-seeking behavior of male victims of intimate partner violence in Japan*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Nagashima, M. (2024). Collision of social norms: Consideration from a sexual harassment case in Japan. *RAIS Conference Proceedings*, 32–38.
- National Police Agency. (2024). *The police white paper 2024 [Digest edition]*. NPA Japan.
- Nikkei Asia. (2024, Mei 18). *30% of Japan's job seekers face sexual harassment, survey shows*. <https://asia.nikkei.com/spotlight/work/30-of-japan-s-job-seekers-face-sexual-harassment-survey-shows>
- Nippon.com. (2018, Agustus 27). *Only a fraction of domestic violence victims contact the police*. <https://www.nippon.com/en/features/h00269/>
- Nippon.com. (2019, Maret 8). *Gender imbalance: Japan's political representation by women lowest in G20*. <https://bit.ly/4qMdiAV>
- Reuters. (2018, April 18). *Top Japanese finance bureaucrat resigns amid sexual harassment allegations*. <https://reut.rs/3LwQ4yq>
- Sato, K., Hashimoto, Y., & Owan, H. (2019). Gender differences in career. *Journal of the Japanese and International Economies*, 53, 101028.
- Squire Patton Boggs. (2015, Maret 3). *Japanese court upholds penalties for sexual harassment*. The National Law Review.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- The Guardian. (2016, Maret 2). *Nearly a third of Japan's women 'sexually harassed at work'*. <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/02/japan-women-sexually-harassed-at-work-report-finds>
- The Jakarta Post. (2024, Oktober 10). *'Denying my potential': Women at Japan's top university call out gender imbalance*. <https://www.thejakartapost.com/culture/2024/10/10/denying-my-potential-women-at-japans-top-university-call-out-gender-imbalance.html>
- The Japan Times. (2025, Juni 5). *Child abuse cases hit record high in Japan in 2024*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/06/05/japan/japan-2024-child-abuse-record-high/>
- Theresia, Y. (2024). Dilema fenomena shoushika tahun 2020-2023: Antara kebijakan imigrasi dan pelanggaran HAM di Jepang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), 10–21.

- Tonami, A., & Yamamoto, H. (2024). Women, social media and political engagement in Japan: A survey study. *International Quarterly for Asian Studies (IQAS)*, 55(3), 335–352.
- Unseen Japan. (2024, Februari 26). *New joint custody in Japan law worries child, DV victims advocates*. <https://unseen-japan.com/joint-custody-japan-objections-women/>
- University World News. (2024, Oktober 16). *Women's universities adapt to survive as population shrinks*. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20241016163358364>
- Widiandari, A. (2016). Fenomena shoushika di Jepang: Perubahan konsep anak. *Izumi*, 5(1), 32–39.
- Widhiutami, B. S., & Santoso, B. (2025). Reasons for delaying marriage by Japanese women and its impact on the shoushika phenomenon. *Journal La Sociale*, 6(5), 1532–1545.
- Women Press Freedom. (2022, Mei 30). *Japan: Female journalist wins sexual assault lawsuit against officer worth \$156,000*. <https://bit.ly/Women-PressFreedom>
- World Economic Forum. (2023). *Global gender gap report 2023: Insight report June 2023*.
- World Economic Forum. (2023, Oktober 12). *Could Japan's paternity leave policy narrow the gender gap?* <https://www.weforum.org/stories/2023/10/could-japans-paternity-leave-policy-help-narrow-the-gender-gap/>
- Zenbird Media. (2020, November 2). *Survey: 15% of Japanese change jobs to avoid sexual harassment*. <https://bit.ly/Zenbirdmedia-survey>
- Zhou, Y. (2015). Career interruption of Japanese women: Why is it so hard to balance work and childcare? *Japan Labor Review*, 12(2), 106–123.